

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Sinergisitas

Sinergitas berasal dari kata sinergi, dapat disebut pula dengan sinergisme ataupun sinergisitas. Dalam kata pengantar pada Jurnal Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2005-2010 Sulawesi Utara karya Sarundajang mengatakan, sinergi mengandung arti kombinasi unsur atau bagian yang dapat menghasilkan pengeluaran yang lebih baik atau lebih besar. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sinergi berarti kegiatan atau operasi gabungan.

Menurut Covey yang dikutip melalui jurnal pembangunan pada student jurnal mengartikan sinergisitas sebagai:

“Kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri-sendiri, selain itu gabungan beberapa unsur akan menghasilkan suatu produk yang lebih unggul. Oleh sebab itu, sinergitas dalam pembangunan berarti keterpaduan berbagai unsur pembangunan yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Covey meambahkan sinergitas akan mudah terjadi bila komponen-komponen yang ada mampu berpikir sinergi, terjadi kesamaan pandang dan saling menghargai”

Melalui dua kesimpulan diatas penulis menarik kesimpulan bahwa sinergitas dapat diartikan kegiatan gabungan atau kerjasama yang dilakukan guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal dengan terhubung oleh beberapa peran yang berbeda namun terkait didalamnya. Oleh karena itu seluruh komponen masyarakat dan pemerintah diharapkan bersinergi agar tercapainya kesejahteraan masyarakat.

## **B. Tinjauan Pembangunan Pariwisata**

### **1. Pengertian Pembangunan**

Menurut Siagian dalam Hadiawan (2006:11) pembangunan merupakan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”.

Sedangkan Kartasmita (1994:121) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Portes dalam Kartasmita (1994:121) juga mendefenisikan bahwa pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dan menurut Nugroho dalam Kartasmita (1994:121),

pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.

Dari beberapa pengertian pembangunan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan adalah suatu upaya yang dilakukan dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang ekonomi maupun sosial yang bertujuan kearah yang lebih baik melalui upaya yang sudah direncanakan. Dan merupakan sebuah tranformasi atau perubahan ekonomi, sosial dan budaya yang di gerakkan atas tujuan atau strategi yang diinginkan yang berguna untuk peningkatan kualitas manusia dalam mempebaiki kualitas hidupnya.

## **2. Pengertian Pariwisata**

Istilah pariwisata berasal dari Bahasa Sangsekerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu pari dan wisata. Pari berarti berulang-ulang atau berkali-kali, sedangkan wisata berarti perjalanan atau bepergian. Jadi pariwisata berarti perjalanan yang dilakukan secara berulang-ulang.

Pengertian pariwisata menurut Norval dalam Yunida (2010:20) adalah keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan masuk, tinggal, dan pergerakan penduduk asing di dalam atau di luar suatu negara, kota, atau wilayah tertentu.

Menurut definisi yang lebih luas yang dikemukakan oleh Spillane (1991:20) pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu. Perjalanan mengunjungi tempat-tempat indah dan terkenal diadakan untuk tujuan kenikmatan dan kesenangan. Hal ini bias sebagai motivasi, ingin tahu serta memperluas pengetahuan para wisatawan.

Spillane menambahkan ada dua kategori dari wisatawan yaitu:

1. Yang benar-benar mengadakan perjalanan untuk kesenangan, kesehatan dan kenikmatan lainnya.
2. Yang datang untuk keperluan usaha atau pekerjaan, studi misi dan lain-lainnya.

Menurut Yoeti (1998:8) pariwisata harus memenuhi empat kriteria di bawah ini, yaitu:

1. perjalanan dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain, perjalanan dilakukan di luar tempat kediaman di mana orang itu biasanya tinggal;
2. tujuan perjalanan dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang, tanpa mencari nafkah di negara, kota atau DTW yang dikunjungi.
3. uang yang dibelanjakan wisatawan tersebut dibawa dari negara asalnya, di mana dia bisa tinggal atau berdiam, dan bukan diperoleh karena hasil usaha selama dalam perjalanan wisata yang dilakukan; dan

4. perjalanan dilakukan minimal 24 jam atau lebih.

Pengertian kepariwisataan terdapat empat faktor yang harus ada dalam batasan suatu definisi pariwisata. Faktor-faktor tersebut adalah perjalanan itu dilakukan dari satu tempat ke tempat lain, perjalanan itu harus dikaitkan dengan orang-orang yang melakukan perjalanan wisata semata-mata sebagai pengunjung tempat wisata tersebut.

### **C. Pembangunan Pariwisata**

Pembangunan dalam bidang pariwisata merupakan suatu hal yang sangat perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah, mengingat banyak sekali keuntungan atau manfaat yang bisa diambil dari kegiatan pariwisata, antara lain dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan dan meratakan pendapatan masyarakat serta memperkenalkan seni budaya daerah dan hasil kerajinan daerah untuk dapat dipasarkan kepada wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara, dan yang tak kalah penting adalah dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD).

Melakukan pembangunan pariwisata dibutuhkan berbagai pendukung untuk memperlancar jalannya kegiatan. Antara lain sumber daya manusia yang berkualitas, adanya dana yang cukup memadai, didukung sarana dan prasarana serta kebijakan dari Pemerintah Daerah yang memprioritaskan bidang pariwisata. Suatu kegiatan pembangunan pariwisata yang sudah baik tanpa adanya dukungan

dari hal-hal tersebut diatas tidak mungkin dapat mencapai hasil yang diharapkan, artinya setiap pengembangan bidang pariwisata sangat membutuhkan dana serta SDM yang berkualitas disamping ditunjang adanya sarana dan prasarana serta kebijakan dari Pemerintah Daerah.

Pembangunan pariwisata Indonesia telah tercermin dalam rencana strategi yang dirumuskan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, yakni:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta pemerataan pembangunan di bidang pariwisata;
2. Mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkesinambungan sehingga memberikan manfaat sosial-budaya, sosial ekonomi bagi masyarakat dan daerah, serta terpeliharanya mutu lingkungan hidup;
3. Meningkatkan kepuasan wisatawan dan memperluas pangsa pasar; dan
4. Menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan pariwisata Indonesia sebagai berdayaguna, produktif, transparan, dan bebas KKN untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, dalam institusi yang merupakan amanah yang dipertanggungjawabkan (*accountable*).

Spillane menambahkan pengembangan pariwisata akan menghasilkan akibat yang lebih luas daripada akibat ekonomis saja. Oleh karena itu dibutuhkan pembinaan

terhadap masyarakat dan pemerintah. Tujuan dari pembinaan pembangunan pariwisata adalah:

1. Menggalakan pemeliharaan segi-segi positif yang berupa kegiatan-kegiatan atau sikap dan sifat langsung atau tidak langsung dari masyarakat bagi pengembangan masyarakat itu sendiri dan kepariwisataan.
2. Menggalakan usaha-usaha pencegahan pengaruh buruk yang mungkin timbul sebagai akibat pengembangan pariwisata, atau setidaknya tidaknya membatasi pengaruh tersebut sekecil-kecilnya.

Kerjasama merupakan kunci berhasilnya pengembangan pariwisata. Baik kerjasama dalam pembinaan produk wisata, kerjasama dalam pemasaran ataupun kerjasama dalam usaha-usaha pembinaan masyarakat.

Unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang pembangunan pariwisata di daerah tujuan wisata yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengembangannya meliputi 5 unsur, yaitu:

1. Objek dan daya tarik wisata,
2. Prasarana wisata,
3. Sarana wisata,
4. Infrastruktur,
5. Masyarakat/lingkungan.

#### **D. Tinjauan Tentang Kerjasama**

Guna meningkatkan mutu kepariwisataan diperlukannya kerjasama. Kerjasama ini dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki andil dalam proses pembangunan serta pihak-pihak yang akan merasakan dampak dari pembangunan pariwisata. Hal ini dilakukan agar terwujudnya tujuan awal yang diharapkan saat terjadinya kerjasama. Melalui konsep kerjasama ini kita dapat mengetahui bagaimana prinsip-prinsip kerjasama agar pelaksana kerjasama melaksanakan peran masing-masing anggota yang sesuai dengan latar belakang peran yang mereka miliki.

Menurut Suit (1996:88) kerjasama dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk menghimpun kekuatan guna menyelesaikan pekerjaan berat dan besar yang tidak dapat diselesaikan oleh satu orang. Mereka menambahkan kerjasama yang positif sangat bermanfaat dan dibutuhkan untuk memecahkan berbagai masalah teknis pekerjaan dan berbagai masalah intern organisasi. selain itu kerjasama ini juga dapat meningkatkan pelayanan terhadap relasi atau pelanggan yang dapat digunakan sebagai banteng pertahanan dalam menghadapi persaingan.

Agar tidak timbul masalah dalam suatu kerjasama pemimpin tertinggi harus benar-benar memperhatikan dan cepat tanggap bila ada guncangan atau keretakan terjadi. Keretakan atau guncangan yang terjadi baik dari tingkat bawah maupun atas akan tetap berpengaruh terhadap kegiatan. Agar tidak terciptanya keretakan pemimpin diharapkan memiliki prinsip-prinsip kerjasama diatas sehingga segala sesuatu yang dianggap tidak baik dapat tercegah sebelum terjadi.

Sedangkan Menurut Pamudji (1985:12). Kerjasama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam pengertian itu terkandung tiga unsur pokok yang melekat pada suatu kerangka kerjasama, yaitu unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan bersama.

Jika satu unsur tersebut tidak termuat dalam satu obyek yang dikaji, dapat dianggap bahwa pada obyek itu tidak terdapat kerjasama. Unsur dua pihak, selalu menggambarkan suatu himpunan yang satu sama lain saling mempengaruhi sehingga interaksi untuk mewujudkan tujuan bersama penting dilakukan. Apabila hubungan atau interaksi itu tidak ditujukan pada terpenuhinya kepentingan masing-masing pihak, maka hubungan yang dimaksud bukanlah suatu kerjasama. Suatu interaksi meskipun bersifat dinamis, tidak selalu berarti kerjasama. Suatu interaksi yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses interaksi, juga bukan suatu kerjasama. Kerjasama senantiasa menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi pada posisi yang seimbang, serasi dan selaras.

Sedangkan menurut Abdulsyani (2012:156), kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami terhadap aktivitas masing-masing. Kerja sama merupakan suatu proses sosial yang paling dasar. Kerjasama timbul apabila orang mulai menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan

mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut melalui kerjasama.

Sehingga dapat disimpulkan kerjasama adalah suatu bentuk proses yang dimana didalamnya terdapat aktifitas yang dilakukan oleh beberapa orang/kelompok yang ditujukan guna mencapai tujuan bersama yang dengan saling membantu dan saling memahami terhadap kegiatan masing-masing.

Kerjasama dalam kelompok menjadi sebuah kebutuhan dalam mewujudkan keberhasilan kerja. Kerjasama dalam kelompok akan menjadi suatu daya dorong yang memiliki energi dan sinergisitas bagi individu-individu yang tergabung dalam kerjasama kelompok. Tanpa kerjasama yang baik tidak akan memunculkan ide-ide cemerlang. Sebagaimana yang dinyatakan Bachtiar dalam Abdulsyani (2012:158) bahwa kerjasama merupakan sinergisitas kekuatan dari beberapa orang dalam mencapai satu tujuan yang diinginkan. Kerjasama akan menyatukan kekuatan ide-ide yang akan mengantarkan pada kesuksesan.

Selain keunggulan diatas, kerjasama juga dapat menstimulasi seseorang berkontribusi dalam kelompoknya, sebagaimana yang dinyatakan Davis (dalam Dewi, 2006) bahwa, Kerjasama adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang didalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok atau berbagai tanggung jawab pencapaian tujuan.

Kontribusi tiap-tiap individu dapat menjadi sebuah kekuatan yang terintegrasi. Individu dikatakan bekerjasama jika upaya-upaya dari setiap individu tersebut secara sistematis terintegrasi untuk mencapai tujuan bersama. Semakin besar integrasinya semakin besar tingkat kerjasamanya.

Indikator-indikator Kerjasama

West menetapkan indikator-indikator kerjasama sebagai alat ukurnya sebagai berikut:

1. Tanggung jawab secara bersama sama menyelesaikan pekerjaan, yaitu dengan pemberian tanggung jawab dapat tercipta kerjasama yang baik.
2. Saling berkontribusi yaitu dengan saling berkontribusi baik tenaga maupun pikiran akan terciptanya kerjasama.
3. Pengerahan kemampuan secara maksimal yaitu dengan mengerahkan kemampuan masing-masing anggota tim secara maksimal, kerjasama akan lebih kuat dan berkualitas.

#### **E. Jaringan (*Networking*)**

Menurut pakar teori jaringan dalam Ritzer (2004:382), pendekatan normatif memusatkan perhatian terhadap kultur dan proses sosialisasi yang menanamkan *inter-nalization* norma dan nilai ke dalam diri aktor. Menurut pendekatan normatif, yang mempersatukan orang secara bersama adalah sekumpulan gagasan

bersama. Pakar teori jaringan menolak pandangan demikian dan menyatakan bahwa orang harus memusatkan perhatian pada pola ikatan objektifitas yang menghubungkan anggota masyarakat. Berikut ungkapan Wellman dalam Ritzer (2004:383) tentang teori jaringan:

“Analisis jaringan lebih ingin mempelajari keteraturan individu atau kolektivitas berperilaku ketimbang keteraturan keyakinan tentang bagaimana mereka seharusnya berperilaku. Karena itu pakar analisis jaringan mencoba menghindari penjelasan normatif dari perilaku sosial. Mereka menolak semua penjelasan nonstruktural yang memperlakukan proses sosial sama dengan penjumlahan ciri pribadi aktor individual dan norma yang tertanam.”.

Dari penjelasan di atas juga dapat di ambil suatu pengertian bahwa ciri khas teori jaringan adalah pemusatan perhatiannya pada struktur mikro hingga makro. Artinya, bagi teori jaringan, aktor mungkin saja individu, tapi mungkin juga kelompok, perusahaan, dan masyarakat. Hubungan dapat terjadi di tingkat struktur sekala luas maupun di tingkat yang lebih kecil.

Menurut gambaran Granoveter dalam Ritzer (2004:384), hubungan di tingkat mikro itu seperti tindakan yang “melekat” dalam hubungan pribadi kongkret dan dalam struktur (jaringan) hubungan itu”. Landasan hubungan ini bahwa setiap aktor (individu atau kolektivitas) mempunyai akses yang berbeda terhadap sumber daya yang bernilai (kekayaan, kekuasaan, informasi). Akibatnya adalah bahwa sistem yang terstruktur cenderung terstratifikasi, komponen tertentu tergantung pada komponen yang lain.

Ritzer (2004:384) mengungkapkan satu aspek penting analisis jaringan adalah bahwa analisis ini menjauhkan sosiolog dari studi tentang kelompok dan kategori sosial dan mengarahkannya untuk mempelajari ikatan di kalangan dan antar aktor yang tak terikat secara kuat dan tak sepenuhnya memenuhi persyaratan kelompok. Contohnya telah diungkapkan dalam karya granoveter tentang “ikatan yang kuat dan lemah” granoveter membedakan antara ikatan yang kuat, misalnya hubungan antara seorang dan teman karibnya, ikatan yang lemah, misalnya hubungan antara seorang dan kenalnya. Berbeda dengan para sosiolog yang menganggap hubungan yang lemah itu tidak penting, granoveter menjelaskan bahwa ikatan yang lemah bisa menjadi sangat penting. Contoh, ikatan yang lemah antara dua aktor dapat membantu sebagai jembatan antara dua kelompok yang kuat ikatan internalnya.

Tanpa adanya ikatan yang lemah seperti itu, kedua kelompok mungkin akan terisolasi secara total dan dapat berakibat sistem sosial semakin terfragmentasi. Tanpa ikatan yang lemah, seorang individu dapat merasa dirinya terisolasi dalam kelompok yang ikatannya sangat kuat dan akan kekurangan informasi tentang apa yang terjadi di kelompok lain maupun dalam masyarakat luas. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ikatan yang lemah dapat mencegah isolasi dan memungkinkan individu mengintegrasikan dirinya dengan lebih baik ke dalam masyarakat lebih luas. Selain itu teori jaringan juga menganggap ikatan yang kuat sangat penting dan mempunyai nilai. Misalnya, orang yang memiliki ikatan kuat akan mempunyai motivasi lebih besar untuk saling membantu dan lebih cepat

untuk saling memberikan bantuan. Berikut prinsip-prinsip dari teori jaringan yang berkaitan logis menurut Ritzer (2004:385):

1. Ikatan antara aktor biasanya adalah simetris baik dalam kadar maupun intensitasnya. Aktor saling memasok dengan sesuatu yang berbeda dan mereka berbuat demikian dengan intensitas yang makin besar atau makin kecil.
2. Ikatan antara individu harus di analisis dalam konteks struktur jaringan lebih luas
3. Terstrukturanya ikatan sosial menimbulkan berbagai jenis jaringan nonacak. Di satu pihak jaringan adalah transitif, di pihak lain ada keterbatasan tentang berapa banyak hubungan yang dapat muncul dan seberapa kuatnya hubungan itu dapat terjadi.
4. Adanya kelompok jaringan menyebabkan terciptanya hubungan silang antara kelompok jaringan maupun antar individu.
5. Ada ikatan asimetris antara unsur-unsur di dalam sebuah sistem jaringan dengan akibatnya bahwa sumber daya yang terbatas akan terdistribusikan secara tak merata.
6. Terakhir, distribusi yang timpang dari sumber daya yang terbatas menimbulkan kerja sama maupun kompetisi. Beberapa kelompok akan bergabung untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas dan kelompok lain akan bersaing dan memperebutkannya.

Jadi, teori jaringan bersifat berkualitas dinamis dengan struktur jaringan akan berubah bersamaan dengan terjadinya pergeseran pola koalisi dan konflik. Satu contoh, memusatkan perhatian pada masalah kepaduan perusahaan dan hubungannya dengan kekuasaan. Menurut Ritzer (2004 :385) secara historis kohesi telah di definisikan dalam dua cara berbeda. Yaitu:

1. Menurut pandangan subjektif, kohesi adalah fungsi perasaan anggota kelompok yang menyamakan dirinya dengan kelompok dan kepentingan individual mereka di kaitkan dengan kepentingan kelompok. Penekanannya disini adalah pada sistem normatif, dan kohesi dihasilkan baik melalui internalisasi sistem normative maupun penekanan kelompok.
2. Menurut pandangan objektif, solidaritas dapat di pandang sebagai tujuan dan sebagai proses yang dapat di amati bebas dari perasaan individual.
3. Selain melihat perilaku sebagai hasil kohesi, masyarakat juga melihat perilaku sebagai hasil kesetaraan struktural. Aktor yang setara secara struktural adalah mereka yang mempunyai hubungan yang sama dengan aktor lain dalam struktur sosial. Jadi kesetaraan struktural ada di kalangan perusahaan meskipun di kalangan perusahaan itu tidak ada komunikasi. Karena mereka berperilaku menurut cara yang sama karena mereka berkedudukan dalam hubungan yang sama dengan beberapa kesatuan lain dalam struktur sosial. Mizruchi menyimpulkan bahwa kesetaraan struktural besar peranannya sebagai pemersatu dalam menerangkan kesamaan perilaku. Mizruchi memberikan peran

penting pada kesetaraan struktural yang secara tak langsung menekankan pentingnya peran jaringan hubungan sosial.

Dari penjelasan diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa didalam suatu jaringan terdapat interaksi dari banyaknya organisasi (*interorganizational*) untuk mencapai tujuan bersama. Agar tercapainya tujuan tersebut dibutuhkan kerjasama dari seluruh pihak yang terlibat. Masing-masing pihak yang terlibat memiliki kepentingan yang sama dengan sumberdaya yang berbeda, sehingga menimbulkan ketergantungan antara satu dan yang lainnya.

#### **F. *Good Governance***

Santosa (2008:130) dalam bukunya mengungkapkan pendapat Landell-Mills dan Seregeldin bahwa *good governance* sebagai penggunaan otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola sumberdaya demi pembangunan sosial ekonomi. Sedangkan Charlik mengartikan *good governance* sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang absah demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan.

Selain itu Santosa (2008:130) menambahkan bahwa *governance* merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Ada tiga pilar *governance*, yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Oleh sebab itu *good governance* sektor publik dapat diartikan sebagai suatu proses tata kelola

pemerintah yang baik, dengan melibatkan *stakeholder*, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas: keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

*Good governance* mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*). Menurut Hadiwinata sinergi yang diciptakan dalam *good governance* adalah pemerintah yang menyediakan perangkat, aturan dan kebijakan. Sektor bisnis yang menggerakkan roda perekonomian, dan sektor *civil society* yang menjalankan aktivitas swadaya guna mengembangkan produktifitas ekonomi, efektifitas dan efisiensi.

Berikut ini adalah prinsip-prinsip dasar dalam mengembangkan dan menerapkan *good governance* dalam pelaksanaannya menurut Gambir dalam Sedarmayanti, (2009:283) antara lain yaitu :

a. Akuntabilitas (*Accountability*)

Suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya. Implementasi akuntabilitas dilakukan melalui pendekatan strategis, yang akan mengakomodasi perubahan-perubahan secara cepat.

b. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi disini dimaksud adanya ruang kebebasan untuk memperoleh informasi publik bagi warga yang membutuhkan (diatur oleh undang-undang). Serta adanya ketegasan antara rahasia negara dengan informasi yang boleh diketahui publik.

c. Efektivitas dan Efisiensi

Pemerintah harus efektif (absah) dan efisien dalam memproduksi *output* berupa aturan, kebijakan , pengelolaan keuangan negara dan lain-lain.

d. Kepastian hukum (*Rule of Law*)

Harus ada perangkat hukum yang menindak pelanggar, menjamin perlindungan HAM, tidak memihak dan berlaku pada semua warga.

e. Partisipatoris

Setiap pembuatan peraturan dan/atau kebijakan selalu melibatkan unsur masyarakat (melalui wakil-wakilnya).

f. Konsensus

Jika ada perbedaan kepentingan yang mendasar didalam masyarakat, penyelesaian masalah diutamakan dengan dialog atau musyawarah.

g. *Responsiveness*

Lembaga publik harus mampu merespon kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan dasar dan HAM agar terciptanya pembangunan yang maksimal.

## 1. Tujuan dan Manfaat Good Governance

Menurut pendapat Daniri dalam Saputra (2013:33) *Good Governance* mempunyai lima macam tujuan utama. Kelima tujuan utama tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
- b. Melindungi hak dan kepentingan para anggota *stakeholders* non pemegang saham.
- c. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
- d. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan.
- e. Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

Mengacu kepada pendapatnya diatas Daniri memandang manfaat dalam penerapan *Good Governance* adalah:

- a. Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang ataupun berupa pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
- b. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil

- seiring dengan turunnya tingkat resiko perusahaan.
- c. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dalam jangka panjang.
  - d. Menciptakan dukungan para *stakeholders* (para pemangku kepentingan) dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.

Manfaat *Good Governance* bukanlah hanya untuk saat ini saja, tetapi juga dalam jangka waktu yang panjang dapat menjadi pilar utama pendukung tumbuh kembangnya perusahaan sekaligus pilar pemenang persaingan global.

## **2. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan *Good Governance***

Menurut pendapat Daniri dalam Saputra (2013:35) ada dua faktor yang memegang peranan terhadap keberhasilan penerapan *Good Governance*, yaitu:

### 1) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah berbagai faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Faktor eksternal tersebut diantaranya adalah:

- a. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
- b. Adanya dukungan pelaksanaan *Good Governance* dari sektor publik / lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *Good Governance* dan *Clean Government* menuju *Good Government Governance* yang sebenarnya.
- c. Terdapatnya contoh pelaksanaan *Good Governance* yang tepat (*best practices*) yang dapat menjadi standar pelaksanaan *Good Governance* yang efektif
- d. Profesional. Dengan kata lain, semacam *benchmark* (acuan), terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan *Good Governance* di masyarakat.

## 2) Faktor Internal

Faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktik *Good governance* yang berasal dari dalam perusahaan. Faktor internal tersebut diantaranya adalah:

- a. Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan *Good Governance* dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.
- b. Adanya berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai *Good Governance*
- c. Adanya manajemen pengendalian resiko perusahaan juga

didasarkan pada kaidah-kaidah standar *Good Governance*.

- d. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
- e. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.

Diluar dua faktor diatas, aspek lain yang paling strategis dalam mendukung penerapan *Good Governance* secara efektif adalah kualitas, *skill*, kredibilitas, dan integritas berbagai pihak yang menggerakkan perusahaan.

### **G. Pengertian Pemerintahan (*Governance*)**

Undang-undang Dasar 1945, pemerintahan dibagi kedalam dua arti yaitu arti luas dan arti sempit. Arti luas dari pemerintahan adalah seluruh kegiatan penguasaan negara oleh lembaga pemegang kekuasaan negara (Presiden, MPR, MK, KY, DPR, DPRD, DPD, dan MA) dalam rangka mencapai tujuan negara. Sedangkan dalam arti sempit pemerintahan adalah pelaksana penguasaan negara yang merupakan kegiatan penyelenggaraan eksekutif untuk memberikan pelayanan umum dan mengangkat kesejahteraan masyarakat.

Surya (2002:5) mengatakan pemerintahan (*governance*) adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan dalam arti luas. Menurut Finer dalam Surya (2002:5), istilah pemerintahan paling tidak memiliki empat hal, yaitu :

- a. Menunjukkan kegiatan atau proses memerintah, yaitu melaksanakan pengawasan atas pihak atau lembaga lain.
- b. Menunjukkan permasalahan-permasalahan negara atau proses memilih terhadap masalah-masalah yang dijumpai.
- c. Menunjukkan pejabat-pejabat yang dibebani tugas-tugas memerintah
- d. Menunjukkan cara-cara atau metode atau sistem yang digunakan

Menurut beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *governance* dalam arti luas adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh badan-badan eksekutif, badan legislatif dan badan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pemerintah. Sedangkan dalam arti sempit *governance* dapat berarti kegiatan-kegiatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif guna mencapai tujuan pemerintahan.

#### **H. Stakeholder**

Berdasarkan pendapat Freeman dalam Selviyanna (2010:42) *stakeholder* dapat didefinisikan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Definisi sempitnya *stakeholder* dapat diartikan sebagai suatu

kelompok dan individu kepada siapa sebuah organisasi bergantung untuk mempertahankan keberadaannya. Sedangkan dalam definisi luas, stakeholder didefinisikan sebagai kelompok individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian suatu tujuan.

Yau dkk dalam Selviyanna (2010:43) berpendapat bahwa :

*"Stakeholder is a group or an individual who can effect, or be affected by, the success or failure of an organization".* ( Stakeholder adalah semua pihak, baik internal ataupun eksternal yang memiliki hubungan mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh suatu perusahaan).

Pendapat lain tentang *stakeholder* menurut Jalal dalam selviyanna (2010:43) bahwa *stakeholder* adalah orang-orang atau kelompok yang secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh suatu hal, serta mereka yang mungkin memiliki kepentingan dalam proyek dan atau kemampuan untuk mempengaruhi hasil, baik positif atau negatif.

Menurut Jones dalam Selviyanna (2010:44) *stakeholder* dapat diklarifikasi kedalam dua kategori, yaitu :

- a. *Inside Stakeholder*, terdiri dari pihak yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumberdaya perusahaan secara berada didalam organisasi perusahaan, seperti pemegang saham (*stakeholder*), para manager, dan karyawan.

- b. *Outside Stakeholder*, terdiri dari orang-orang atau pihak-pihak yang bukan pemilik perusahaan, bukan pemimpin perusahaan, dan bukan pula karyawan perusahaan tetapi memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan, seperti pelanggan, *costumers*, pemasok, pemerintah (*govenment*), masyarakat lokal, dan masyarakat secara umum (*general public*).

Menggunakan sudut pandang yang berbeda, Post Et. Al dalam Selviyanna (2010:42) membagi *stakeholder* (pemangku kepentingan) kedalam dua kategori, yaitu :

- a. *Primary Stakeholder* (pemangku kepentingan utama), adalah berbagai pihak yang berinteraksi langsung dalam aktivitas bisnis perusahaan serta mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melaksanakan tujuan utamanya, meliputi : para pemegang saham, Para karyawan, para pemasok (*suplier*), para kreditur (*creditors*), para pelanggan (*customers*), para pedagang besar dan eceran (*whole sellers and retailers*).
- b. *Secondary Stakeholder* ( Pemangku kepentingan sekunder, adalah orang-orang atau kelompok didalam masyarakat yang dipengaruhi secara langsung maupun tidak langsung oleh berbagai aktivitas atau keputusan utama perusahaan, meliputi : masyarakat secara umum (*general public*), komunitas lokal (*local comunity*), pemerintah pusat dan daerah (*federal state and local government*), para pemerintah

asing (*foreign government*), kelompok aktivitas sosial (*social activist groups*), dan berbagai kelompok pendukung bisnis (*business support group*).

Berdasarkan konsep diatas, *stakeholder* dapat diartikan sebagai pihak eksternal maupun internal yang mempengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung atas aktifitas kebijakan yang diambil oleh suatu perusahaan. Para *stakeholder* yang terkait harus membentuk hubungan yang baik dan saling mendukung yang biasa disebut dengan kerjasama multi pihak (*multi stakeholder*).